



**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,  
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tentram dan tertib diperlukan peran serta Pemerintah Daerah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - b. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Pesetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketenteraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
5. Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum.
9. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
10. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
11. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum.
12. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.

13. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Provinsi dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
14. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- d. tugas pembantuan dan koordinasi;
- e. penguatan kelembagaan Satpol PP;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan;
- i. kerjasama;
- j. pendanaan;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. sanksi

### BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
  - b. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketenteraman dan ketertiban umum.

- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Trantibum.

### BAB III PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui tahapan:
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan
- (2) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- a. penanganan Gangguan Trantibum; dan
  - b. penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.
- (3) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
- a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung;
  - c. instansi vertikal;
  - d. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - e. Pemerintah Desa.

#### Bagian Kedua Penanganan Gangguan Trantibum

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 6

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib di:
- a. jalan;
  - b. sungai;
  - c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. lingkungan;
  - e. sumber daya mineral;
  - f. kehutanan;
  - g. perizinan;
  - h. pendidikan;
  - i. kesehatan;
  - j. sosial;

- k. tata ruang;
  - l. perpajakan dan retribusi Daerah;
  - m. aset Daerah; dan
  - n. keadaan bencana.
- (2) Selain tenteram dan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan Gangguan Trantibum juga dilakukan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2  
Tenteram dan Tertib Jalan

Pasal 7

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:

- a. menempatkan barang;
- b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
- d. membuat atau memasang portal;
- e. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
- f. membuat atau memasang tanggul jalan;
- g. memarkir kendaraan bermotor;
- h. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
- i. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
- j. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Tenteram dan Tertib Sungai

Pasal 8

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai tanpa izin;
- b. mengambil air sungai untuk kepentingan komersil tanpa izin; dan/atau
- c. membuang sampah di sungai dan/atau sempadan sungai.

Paragraf 4  
Tenteram dan Tertib Kawasan Pesisir  
Dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 9

Setiap orang dilarang:

- a. membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini;
- b. membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;

- c. membuang limbah dan/atau sampah di pantai dan/atau perairan pesisir;
- d. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
- e. melakukan reklamasi tanpa izin; dan/atau
- f. melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Paragraf 5  
Tenteram dan Tertib Lingkungan

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- c. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan; dan/atau
- d. mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.

Paragraf 6  
Tenteram dan Tertib Sumber Daya Mineral

Pasal 11

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan mineral logam dan batuan tanpa izin.

Paragraf 7  
Tenteram dan Tertib Kehutanan

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pemanfaatan di kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung tanpa izin.
- b. melakukan perusakan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung.

(2) Pemanfaatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemanfaatan kawasan hutan;
- b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- c. pemungutan hasil hutan; dan
- d. pemanfaatan jasa lingkungan.

Paragraf 8  
Tenteram dan Tertib Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan usaha pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 9  
Tenteram dan Tertib Pendidikan

Pasal 14

- (1) Siswa atau kelompok siswa dilarang:
  - a. mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah apabila belum memiliki surat izin mengemudi;
  - b. membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
  - c. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan/atau
  - d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

Pasal 15

- (1) Sekolah wajib melakukan pendataan siswa yang mengendarai kendaraan bermotor dan memiliki surat izin mengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan kendaraan berupa:
  - a. sepeda bagi siswa;
  - b. bus sekolah antar-jemput gratis bagi siswa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan ruang terbuka hijau di setiap sekolah.

Paragraf 10  
Tenteram dan Tertib Kesehatan

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan dan/atau tindakan medis; dan
- c. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan; tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11  
Tenteram dan Tertib Sosial

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum tanpa izin;
- b. mengemis, mengamen, berjualan, dan/atau mengelap mobil di fasilitas umum;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau mengelap mobil di fasilitas umum; dan/atau
- d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.

Paragraf 12  
Tenteram dan Tertib Tata Ruang

Pasal 18

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin.

Paragraf 13  
Tenteram dan Tertib Perpajakan  
dan Retribusi Daerah

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal pajak daerah dan/atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14  
Tenteram dan Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 20

Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah.

Paragraf 15  
Tenteram dan Tertib Keadaan Bencana

Pasal 21

- (1) Dalam hal penanganan bencana nasional, dan/atau bencana daerah setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana.
- (3) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 21, dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan:
  - a. pembinaan;
  - b. pencegahan;
  - c. pengawasan; dan
  - d. penertiban.
- (2) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. pendidikan/bimbingan teknis; dan
  - c. penyuluhan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. deteksi dini dan cegah dini;
  - b. sosialisasi dan pendidikan; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
  - b. kegiatan patroli;
  - c. pengawalan; dan
  - d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. operasi yustisi; dan
  - b. operasi non yustisi
- (6) penanganan gangguan trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan pembinaan, pencegahan, pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 23

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.

- (2) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memiliki dampak sosial yang lintas dan resiko tinggi.
- (3) Penanganan Gangguan Trantibum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait bersama-sama Satpol PP sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penegakan Perda Provinsi dan/atau  
Peraturan Gubernur

Pasal 24

- (1) Satpol PP berwenang menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
- (2) Kewenangan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur; dan
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Peraturan Gubernur dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terdiri dari unsur:
  - a. PPNS Pol PP;
  - b. PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Satpol PP melalui sekretariat PPNS Provinsi.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil Penyelidikan dan Penyidikan kepada Gubernur cq. Kasatpol PP untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Gubernur wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat agar mengetahui dan terampil dalam mendukung keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- (3) Dukungan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
  - b. pemeliharaan kehidupan sosial yang harmonis;
  - c. penyelenggaraan pemilihan umum; dan
  - d. upaya pertahanan negara.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Gubernur melakukan koordinasi dalam fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi.

Pasal 29

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Gubernur berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 30

Setiap orang wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

#### Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 32

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial.
- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB V TUGAS PEMBANTUAN DAN KOORDINASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

- (1) Dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta untuk penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur, Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas pembantuan dan/atau melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

- (2) Dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta untuk penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki dampak sosial dan/atau dampak kesehatan yang luas dan risiko tinggi, Satpol PP meminta bantuan personil dan peralatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kedua  
Tugas Pembantuan

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menugasi Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; dan/atau
  - b. menugasi Desa.
- (2) Penugasan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, dan/atau penanganan Gangguan Trantibum dan penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten/Kota yang diberikan Tugas Pembantuan berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penanggung jawab dan pemegang kendali komando penegakan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Koordinasi

Pasal 36

Gubernur mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Satpol PP memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau tidak melakukan penanganan atas Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangannya sehingga berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah, maka Satpol PP melakukan upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Gangguan Trantibum skala Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 38

- (1) Untuk mewujudkan koordinasi yang baik antara Satpol PP dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Satpol PP membentuk forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan kegiatan apel bersama yang melibatkan instansi pemerintahan lainnya.

### BAB VI PENGUATAN KELEMBAGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

#### Pasal 39

- (1) Dalam rangka menegakkan Perda dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP berhak mendapatkan data, izin dan/atau rekomendasi dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (4) Data, izin dan/atau rekomendasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan penegakan Perda dan Peraturan gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 40

- (1) Gubernur memprioritaskan pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dalam setiap formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam hal pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat terpenuhi, Gubernur memenuhi kekurangan tersebut melalui perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk diangkat sebagai pegawai pembantu Polisi Pamong Praja.

- (3) Perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Satpol PP serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja yang didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (5) Penyusunan rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian.
- (6) Rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 41

- (1) Gubernur meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, dari sarana dan prasarana yang minimal menjadi sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gedung kantor;
  - b. kendaraan operasional; dan
  - c. perlengkapan operasional.
- (3) Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
  - a. perlengkapan perorangan;
  - b. perlengkapan beregu;
  - c. perlengkapan patroli; dan
  - d. perlengkapan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 42

- (1) Dalam memenuhi perlengkapan penegakan Perda dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d, Gubernur menyelenggarakan dan mengembangkan sistem penegakan Perda dan Peraturan Gubernur berbasis teknologi dan informasi melalui Media Center.
- (2) Media Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh fasilitas minimal dan layanan minimal.
- (3) Fasilitas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. gedung;
  - b. sarana prasarana; dan
  - c. sumber daya manusia.
- (4) Layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. layanan pengaduan reguler;
  - b. layanan situasi krisis; dan
  - c. layanan koordinasi antar instansi pemerintahan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Media Center, fasilitas minimal, dan layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 43

- (1) Gubernur memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c guna terlaksananya penegakan Perda dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara efektif.
- (2) Selain peruntukan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk memenuhi hak ASN Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- melaporkan adanya pelanggaran Perda Provinsi atau Peraturan Gubernur, dan/atau Gangguan Trantibum;
  - menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
  - memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

#### Pasal 45

- Gubernur memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain melalui:
- pembentukan bantuan penertiban (bantib), pasukan pengamanan masyarakat swakarsa (pamswakarsa), pos keamanan lingkungan (pos kamling), dan pos terpadu;
  - program pembentukan dan pengembangan kader penegak Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan/atau
  - pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 46

- (1) Gubernur memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Polisi Pamong Praja Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas provinsi lintas kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. pendidikan/bimbingan teknis; dan
  - c. penyuluhan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 49

- (1) Penanganan Gangguan Trrantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait.

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 50

- (1) Satpol PP wajib melaporkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelaporan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP.

## BAB X KERJA SAMA

### Pasal 52

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati..
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 53

Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 54

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Provinsi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
  - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Teknis pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII SANKSI

#### Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar Gangguan Trantibum dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 atau Pasal 30 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. peringatan tertulis;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. penghentian tetap kegiatan;
  - f. pencabutan sementara izin;
  - g. pencabutan tetap izin;
  - h. paksaan pemerintahan;
  - i. denda administratif ; dan/atau
  - j. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Umum Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 56

Dalam hal Perda mengatur ancaman sanksi pidana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

TTD.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:  
(6-216/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,  
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan desentralistik yakni dengan diberikannya otonomi kepada provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan otonomi seluas-luasnya kecuali terhadap urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahan kepada provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam perspektif Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan tersebut sebagai urusan konkuren. Bahkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penekanan bahwa urusan konkuren yang diserahkan (didesentralisasikan) kepada daerah otonom merupakan dasar pelaksanaan otonomi. Selanjutnya, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan konkuren tersebut menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Salah satu urusan pemerintahan konkuren adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang termasuk ke dalam urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar *sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, maka setiap satuan pemerintahan, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk itu, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditentukan beberapa kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yakni: (1) Penanganan Gangguan Trantibum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan (3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka ditingkat Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi. Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Selanjutnya, dalam Pasal 255 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang “menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.

Dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyusun/membentuk kebijakan hukum (legal policy) dalam bentuk Peraturan Daerah. Urgensi penyusunan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan tersebut dibutuhkan Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Provinsi Kalimantan Selatan untuk membentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan cukup luas, terutama kewenangan yang diatur dalam Pasal 14, yakni yang terkait dengan urusan kelautan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral. Untuk itu, Peraturan Daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban pada sektor-sektor tersebut.
- c. Dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat luas, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tidak mudah. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi antar instansi dengan kabupaten/kota, instansi-instansi pemerintah pusat, desa, dan masyarakat. Peraturan Daerah ini menjadi landasan untuk melakukan koordinasi antar instansi-instansi tersebut.
- d. Perlunya penguatan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, baik yang bersifat yustisial maupun non yustisial.

Dengan dasar latar belakang tersebut, maka tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ialah: (1) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) untuk mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan; (3) memperkuat ketenteraman dan ketertiban umum dalam pengelolaan kehutanan, kelautan dan energi sumber daya mineral; (4) memperkuat koordinasi dengan instansi-instansi terkait; dan (5) memperkuat kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi dalam menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya Gangguan Trantibum skala Kabupaten/Kota, namun dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Perda Provinsi mengatur materi muatan untuk “kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.”, maka Pelaksanaan atas ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (3).

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perintah dan/atau larangan adalah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berisi boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka menangani dan/atau menanggulangi bencana. Contoh larangan dan/atau perintah dimaksud disesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi antara lain:

Perintah:

- Selalu membawa kartu identitas;
- menghentikan segala kegiatan di kawasan bencana; dan/atau
- selalu menggunakan masker apabila beraktivitas diluar rumah.

Larangan:

- membawa alat/senjata tajam yang dapat dipakai sebagai alat/pemicu kerusuhan;
- memasuki atau meninggalkan daerah pandemi/epidemi; dan/atau
- melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Perda Provinsi;
- c. Peraturan Gubernur;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Peraturan Bupati/Walikota.

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan ialah kebijakan pemerintahan yang bersifat tertulis (beleids regel) yang berbentuk surat edaran, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, maklumat, dan/atau kebijakan tertulis lainnya yang dikeluarkan dan ditujukan kepada setiap Orang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini dibentuk untuk mengklasifikasikan 7 (tujuh) bentuk kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Dengan kata lain bahwa semua bentuk kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diklasifikasikan kedalam 4 (empat) bentuk tindakan, namun uraian kegiatannya telah diatur dalam norma berikutnya yang mencakup seluruh kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Disamping itu, ketentuan norma larangan dan norma perintah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 tidaklah menghapus norma larangan dan norma perintah sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi terkait, sehingga penanganan Gangguan Trantibum juga berlaku terhadap pelanggaran norma larangan dan norma perintah dalam Perda Provinsi terkait. Misalnya norma larangan pada ketentuan Tenteram dan Tertib Kesehatan tidaklah menghapus ketentuan norma larangan dalam Perda Provinsi yang mengatur kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengorganisasian” dalam ketentuan ini ialah kegiatan untuk membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan seperti Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) yang akan membantu Satpol PP dalam menyelenggarakan pelindunganmasyarakat. Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” dalam ketentuan ini ialah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan guna terwujudnya pelindungan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan bencana atau untuk mencegah dampak bencana yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan status darurat bencana adalah penetapan darurat bencana oleh Presiden, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan protokol kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Ketentuan ini merupakan bentuk pelaksanaan atas kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembantu Polisi Pamong Praja” dalam ketentuan ini ialah untuk menegaskan status Polisi Pamong Praja yang harus diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, sehingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Gubernur berkedudukan sebagai pembantu Polisi Pamong Praja. Namun untuk menjamin profesionalitasnya, pembantu Polisi Pamong Praja wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang setara dengan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Polisi Pamong Praja. Disamping itu, dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pembantu Polisi Pamong Praja tidak bersifat mandiri melainkan bertugas untuk membantu Polisi Pamong Praja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tindakan represif” adalah tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal yang mengandung unsur perbuatan pidana seperti penganiayaan, pengrusakan, ujaran kebencian, persekusi, pencemaran nama baik dan tindakan represif lainnya yang memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan sanksi paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata dari Pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula, antara lain berupa:

- a. penertiban;
- b. penyegelan;
- c. pembongkaran;
- d. pembubaran kerumunan;
- e. perintah meninggalkan tempat;
- f. pengamanan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu;
- g. sanksi yang bersifat mendidik, menghentikan dan/atau memulihkan seperti hukuman dalam bentuk membantu pelayanan di fasilitas umum dan/atau kerja sosial pada fasilitas umum selama jangka waktu tertentu dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus seperti rompi dengantanda/tulisan khusus; dan/atau
- h. tindakan pemerintahan lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran;

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR